

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**

PUSLATBANG KMP LAN RI

VOLUME XVII NOMOR 1 JUNI 2021

Penanggung Jawab:

Dr. Andi Taufik, M. Si

Redaktur/Journal Editor:

Anita, S. Sos., M. Si

Mitra Bestari:

Prof. Dr. Abdul Mahsyar, M. Si
Prof. Dr. Haedar Akib, M. Si
Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M. Si
Prof. Dr. Nurliah Nurdin., MA
Prof. Dr. Drs. Sam'un Jaja Raharja, M. Si
Prof. Dr. Sangkala., M. Si
Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP
Dr. Bevaola Kusumasari, M. Si
Dr. Rulinawaty, S. Sos., M. Si
Dr. St. Syamsudduha, M. Pd

Editor:

Dr. Frida Chairunisa, M. Si
Dr. Halim, SH., MH
Dr. Johan Tarru Mada, M. Si
Dr. Puji Lestari, M. Si
Dr. Phil. Sukri, PhD
Milawaty, SS., MM

Penyunting/Section Editor:

Ahmad Sukarno, S. IP., M. Adm. SDA
Syakib Arsalan, S. Hi., LL. M
Zaenal Z., S. Sos., M. Adm. Pemb.

Copy Editor & Layout Editor:

Andi Dirga Putra, S. IP
Anisa Mifrohatun Fathiyah, S. I. A.
Avrina Dwijayanti, S. IP.
Ayun Sri Damayanti, SH., MH
Muskamal, S. Sos., M. Si
Nur Khasanah Latief, S. IP
Nur Masyita, S. Psi
Erman Fahrudin, S. Si

Desain Grafis:

Muhammad Iqbal, S. Sos., MA

Volume XVII Nomor 1 Juni 2021

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**
PUSLATBANG KMP LAN RI

Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan
Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KMP LAN)
Jl. Raya Baruga No. 48 Makassar, 90234
E-mail: jap@lan.go.id | URL: <http://makassar.lan.go.id/jap>

CALL FOR PAPER:

Redaksi menerima naskah hasil penelitian, analisis, kajian, pemikiran kritis, dan gagasan ilmiah dalam lingkup bidang administrasi publik yang belum diterbitkan di jurnal ilmiah lainnya. Naskah hendaknya diketik dalam MS Word menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang 6000-8000 kata, ukuran A4, huruf Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1,5. Abstrak ditulis dalam dwi bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) masing-masing sepanjang 100-200 kata. Naskah di-*submit* ke <http://makassar.lan.go.id/jap> atau dikirim melalui email ke Redaksi dalam bentuk soft file copy. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi akan di-*review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*).



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2021

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

Volume XVII Nomor 1 Juni 2021
Hal. 1-182

-
1. **KOMPETENSI PESERTA PELATIHAN SEBELUM DAN SAAT MASA PANDEMI COVID-19: STUDI KASUS LATSAR CPNS** 1-36
Putri Wulandari Atur Rejeki, Yuyu Yuningsih
 2. **EVALUASI PENGEMBANGAN *COACHING* PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PROVINSI SULAWESI TENGGARA ANGKATAN XCV, XCVI, DAN XCVII TAHUN 2021** 37-58
Sahabuddin
 3. **EFEKTIVITAS PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI GURU BIDANG KELAUTAN PERIKANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA** 59-78
Al Azhar
 4. **FUNGSI ADMINISTRASI PERKANTORAN MODERN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN ORGANISASI PUBLIK** 79-94
Rudi Salam, Haedar Akib, Syakib Arsalam
 5. **PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAYANAN BPJS KESEHATAN DI KOTA PALOPO** 95-116
Andi Ni'mah Sulfiani
 6. **POTRET PERAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK: STUDI KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DI INDONESIA** 117-150
Milawaty
 7. **FUNGSI BIROKRASI SEBAGAI PENASIHAT KEBIJAKAN: STUDI FENOMENOLOGIS PADA PEMERINTAH DAERAH** 151-174
Avrina Dwijayanti

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XVII Nomor 1 Juni 2021

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang berbahagia, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Nomor 1, Juni 2021 dapat kembali hadir ke hadapan pembaca.

Di edisi kali ini, Jurnal Administrasi Publik menghadirkan 7 artikel yang secara keseluruhan merupakan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik. Tulisan pertama ditulis oleh Putri Wulandari Atur Rejeki, Yuyu Yuningsih dengan judul “Kompetensi Peserta Pelatihan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Latsar CPNS”. Tulisan kedua berasal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sahabuddin yang bertajuk “Evaluasi Pengembangan Coaching Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Angkatan XCV, XCVI, dan XCVII Tahun 2021”. Tulisan ketiga dihadirkan oleh Al Azhar dengan judul “Efektivitas Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia”. Tulisan keempat ditulis oleh Rudi Salam, Haedar Akib, Syakib Arsalam yang diberi tajuk “Fungsi Administrasi Perkantoran Modern Dalam Mendukung Pelaksanaan Organisasi Publik”. Dalam tulisan kelima, Andi Ni'mah Sulfiani mencoba menuliskan hasil penelitiannya mengenai “Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo”. Tulisan keenam dihadirkan oleh Milawaty yang mengambil judul “Potret Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak: Studi Kasus Kekerasan Seksual pada Masa Tanggap Darurat Bencana Alam di Indonesia”. Adapun tulisan ketujuh, ditulis oleh Avrina Dwijayanti dengan judul “Fungsi Birokrasi Sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah”.

Redaksi Jurnal Administrasi Publik mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada penulis yang telah bersedia mengirimkan naskahnya kepada kami. Tidak lupa kami mengundang pembaca untuk berpartisipasi mengirimkan tulisan yang dimiliki untuk Jurnal Administrasi Publik edisi selanjutnya.

Semoga setiap tulisan yang ada di dalam jurnal edisi ini dapat menjadi motivasi, sumbangan ide, serta tambahan ilmu bagi seluruh pembaca. Salam inovasi.

Redaksi

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XVII Nomor 1 Juni 2021

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya

Putri Wulandari Atur Rejeki, Yuyu Yuningsih

Kompetensi Peserta Pelatihan Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Latsar CPNS

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Nomor 1 Juni 2021, Hal. 1-36

Perkembangan teknologi membuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di masa pandemi Covid-19. Pelatihan yang semula diselenggarakan secara tatap muka berubah menjadi non-tatap muka dengan metode *e-learning*. Hal ini tentu saja dapat memengaruhi hasil kompetensi peserta pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait kompetensi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) sebelum dan pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta Latsar CPNS Golongan III yang mengikuti pelatihan di Puslatbang PKASN LAN pada periode 2019 – 2020. Data yang digunakan adalah data sekunder dari database Puslatbang PKASN LAN mengenai nilai hasil evaluasi peserta Latsar CPNS, yaitu evaluasi akademik, evaluasi aktualisasi, evaluasi sikap dan perilaku, serta evaluasi kompetensi teknis bidang tugas. Data diolah menggunakan program SPSS versi 23 yang selanjutnya dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kompetensi peserta Latsar CPNS sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 secara signifikan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan peningkatan dan pengembangan kompetensi peserta pelatihan diantaranya yaitu instansi penyelenggara pelatihan harus memperhatikan seluruh aspek penyelenggaraan pelatihan dengan metode *e-learning*. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu konten/materi pembelajaran, strategi pembelajaran, sarana dan prasarana serta SDM terkait penyelenggaraan pelatihan.

Kata Kunci: Pelatihan, Kompetensi, pandemi Covid-19, Latsar CPNS

Sahabuddin

**Evaluasi Pengembangan Coaching Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara Angkatan XCV, XCVI, dan XCVII Tahun
2021**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi (membandingkan antara seharusnya dan praktik yang terjadi) praktik *coaching* yang dilaksanakan dalam Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XCV, XVI dan XCVII Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021. Dari hasil penelitian diperoleh hasil antara lain: Penunjukan *coach* pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XCV, XVI dan XCVII selama ini adalah penugasan pembimbingan peserta Latsar dengan label “coach”, penunjukan *coach* belum didasari atas kejelasan kompetensi dan kualifikasi. Pemahaman para *coach* terhadap aspek-aspek *coaching* selama ini masih lemah, baik *coach* maupun peserta masih belum bisa membedakan antara *coaching*, mentoring, dan konseling karena sebelum penugasan dan pelaksanaan pembimbingan mereka tidak pernah mendapatkan penjelasan dan pengarahan tentang *coaching*, mentoring, dan konseling secara mendalam, dan mereka baru menjadi coach sejak adanya Latsar. Sebagian besar *coach* belum memiliki keterampilan *coaching* yang semestinya. Sebagian besar *coach* melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat teknis dari persoalan yang dihadapi peserta dan hampir setengah dari mereka melakukan penggalian kompetensi peserta yang bersifat adaptif. Hal itu terjadi karena selama ini mereka kurang mendapat penjelasan dan pelatihan bagaimana membedakan antara *coaching* dan mentoring peserta Pelatihan Dasar CPNS.

Kata kunci: *coaching*; mentoring; konseling; kompetensi dan kualifikasi *coach*; model dan teknik *coaching*

Al Ahzar

Efektivitas Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia

Guru harus mengoptimalkan kompetensi dan kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai pendidik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu upaya untuk meningkatkan kinerja guru melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat efektivitas pelaksanaan peningkatan kompetensi guru bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi, dan komunikasi (KPTK) di Indonesia sebagai program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPPPTK KPTK sebagai unit pelaksana teknis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sasaran dan realisasi peserta pelatihan guru bidang KPTK tahun 2015-2019. Metode pencarian data dan informasi lainnya dengan penelusuran pustaka/literatur dan menelaah data sekunder. Analisis data studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru bidang KPTK yang dilaksanakan selama lima tahun (2015-2019) sudah efektif. Hal ini terbukti dengan terlaksananya seluruh program diklat sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan, rapinya penyelenggaraan seluruh kegiatan diklat, efisiensi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia, dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan bagi program diklat dari total sasaran 15.096 orang, terealisasi sebanyak 20.901 orang (138,5%).

Kata kunci: Efektivitas, Peningkatan Kompetensi, Guru KPTK

Rudi Salam, Haedar Akib, Syakib Arsalam

Fungsi Administrasi Perkantoran Modern dalam Mendukung Pelaksanaan Organisasi Publik

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Nomor 1 Juni 2021, Hal. 79-94

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi administrasi perkantoran modern dalam mendukung pelaksanaan organisasi publik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis (kualitatif). Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kecamatan Barombong dengan informan penelitian berasal dari penerima layanan, camat, sekretaris camat, staf / pegawai dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan organisasi publik sangat terbantu dengan adanya administrasi perkantoran modern. Terdapat beberapa faktor organisasional yang membantu pelaksanaan organisasi publik dalam pemanfaatan fungsi administrasi perkantoran modern seperti: kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, dan teknologi. Dari keempat faktor tersebut, hanya aspek teknologi yang masih perlu ditingkatkan karena penggunaan dan penyediaan teknologi masih rendah. Akibatnya pelaksanaan pelayanan efektif tetapi belum mampu dikategorikan sebagai pelayanan yang efisien.

Kata Kunci: Organisasional; Perkantoran Modern; Administrasi Modern

Andi Ni'mah Sulfiani

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Nomor 1 Juni 2021, Hal. 95-116

Pelaksanaan *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Salah satu masalah yang terjadi yaitu kurangnya keterbukaan terhadap informasi terkait iuran dan denda yang harus dibayar oleh peserta BPJS Kota Palopo. Penelitian ini berusaha untuk mengungkap masalah yang berhubungan dengan prinsip-prinsip *good governance* dengan menggambarkan suatu fakta-fakta yang ada di Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Kota Palopo dan alasan penulis memilih lokus ini karena banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor BPJS tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dan dokumentasi terhadap sejumlah informan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih adanya keluhan-keluhan dari peserta BPJS Kesehatan mengenai denda pelayanan dan iuran bagi pengguna/peserta BPJS Kesehatan di Kota Palopo

Kata kunci: Pelaksanaan, Pelayanan, BPJS Kesehatan.

Milawaty

Potret Peran Pemerintah terhadap Perlindungan Anak: Studi Kasus Kekerasan Seksual pada Masa Tanggap Darurat Bencana Alam di Indonesia

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Nomor 1 Juni 2021, Hal. 117-150

Penelitian ini bertujuan untuk memotret kekerasan seksual pada anak penyintas bencana alam (korban selamat dari bencana alam) yang terjadi pada masa tanggap darurat di Indonesia, mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual pada anak penyintas bencana, dan melihat peran pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi anak-anak terhadap potensi bahaya kekerasan seksual. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada anak penyintas bencana alam. Data kejadian difokuskan dalam situasi bencana, yaitu pada masa tanggap darurat, khususnya di lokasi pengungsian, dengan pertimbangan masa tersebut merupakan masa rawan yang ditandai dengan banyaknya kejadian pelecehan terhadap anak. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diperoleh antara lain adalah penelantaran, perdagangan anak, perkosaan dan percobaan perkosaan, diskriminasi, pelecehan, pernikahan dini dan pemaksaan pernikahan, dan pengintipan yang dilakukan saat mandi di lokasi-lokasi pengungsian, (2) Konstruksi bangunan yang belum sesuai dengan gender infrastruktur, faktor norma sosial, menurunnya proteksi orang tua, ketidakpastian ekonomi, bantuan kemanusiaan yang tidak sensitive gender dan peduli anak, lama waktu pengungsian, kekerasan seksual yang tidak ditindaklanjuti sampai ke kepolisian, lemahnya aturan keamanan dan keselamatan, besarnya peran media, dan keluarga yang terpisah dari komunitasnya menjadi faktor penyebab masih ditemukannya berbagai kekerasan seksual pada anak pascabencana alam, (3) peran pemerintah dan pemerintah daerah adalah pemerintah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara pemerintah daerah melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Anak Penyintas Bencana, Perlindungan Anak

Avrina Dwijayanti

Fungsi Birokrasi sebagai Penasihat Kebijakan: Studi Fenomenologis pada Pemerintah Daerah

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Nomor 1 Juni 2021, Hal. 151-174

Birokrasi, selain memiliki fungsi administratif juga perlu ditilik fungsinya sebagai penasihat kebijakan, terutama di lingkungan pemerintahan di mana dikotomi politik dan administrasi tidak lagi dilihat dalam batasan yang kaku dan interaksi antara birokrat dengan politisi lebih dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan kembali posisi birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai penasihat kebijakan bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian fenomenologis, dengan

teknik analisis data kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen yang relevan dengan topik penelitian yakni dengan mengakumulasi data dari beberapa pemerintah daerah untuk melihat kecenderungan terlaksananya fungsi tersebut. Penelitian ini berimplikasi secara praktis untuk menemukan pola membangun relasi antara pejabat politik dan birokrasi dalam rangka pengambilan keputusan terkhusus pada pemberian nasihat kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pendukung terlaksananya fungsi birokrasi sebagai penasihat kebijakan telah tersedia melalui saluran informasi. Kendala yang mendominasi adalah kapasitas keahlian profesional birokrat serta munculnya kompetisi antara birokrasi dengan aktor lainnya dalam memberikan nasihat kebijakan sebagai akibat dari situasi elektoral di daerah.

Kata Kunci: Fungsi Birokrasi; Penasihat Kebijakan; Pemerintah Daerah.

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

PUSLATBANG KMP LAN RI

P-ISSN: 1858-2168

E-ISSN: 2621-251X

Volume XVII Nomor 1 Juni 2021

The abstract sheet may be reproduced/copied without permission or charge.

Putri Wulandari Atur Rejeki, Yuyu Yuningsih

Participants' Competencies Before and During Covid-19 Pandemic: Study on Basic Training Of Prospective Civil Servants

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Number 1 June 2021, Page 1-36

The development of technology that implemented in education and training made significant changes, especially during the Covid-19 pandemic. The training, which was held classically has turned into non-classical with the e-learning method. This of course can affect the competency results of the training participants. This study aims to provide an overview of participants' competencies in the Basic Training of Prospective Civil Servants (Latsar CPNS) before and during the Covid-19 pandemic. The research method used is quantitative. The population of this study was all of Latsar CPNS participants type III who attended the training in Puslatbang PKASN LAN in 2019 - 2020. The data used are secondary data from the Puslatbang PKASN LAN database regarding the evaluation results of Latsar CPNS participants i.e academic evaluation, actualization evaluation, attitude and behavior evaluation, and evaluation of technical competence in the field of duty. The data were processed using the SPSS version 23 program, then analyzed using the Mann-Whitney test. The results showed that there are significant differences in the competence of Latsar CPNS participants before and during the Covid-19 pandemic. Therefore, several efforts could be made to maximize the improvement and development of the competence of training participants, including training providers who must pay attention to all aspects related to the implementation of e-learning method. These aspects include the content/learning materials, learning strategies, facilities, infrastructure, and human resources related with the training.

Keywords: *Training, Competencies, Covid-19 Pandemic, Apparatus*

Sahabuddin

Evaluation of Coaching Development in Basic Training of Civil Servant Candidates in The Province of Southeast Sulawesi Batch XCV, XCVI, and XCVII 2021

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Number 1 June 2021, Page 37-58

The purpose of this research is to evaluate (comparing of the compulsion and the practice) of coaching practice performed in the basic training of civil servant candidates batch XCV, XCVI, and XCVII in the province of Southeast Sulawesi year 2021. From the result, it is obtained that the coach election in the basic training of civil servant candidates batch

XCV, XCVI, and XCVII is the assignment of supervising the participants of basic training labelled “coach”, which the coach election is not based of the competencies and qualification clarity. The coaches understanding over the coaching aspects is considered weak, both coaches and participants who have not understood of how to differ coaching, mentoring, and counselling because before the assignment and the implementation of supervision, they never received the explanation and briefing about coaching, mentoring, and counselling deeply, besides they have just been a coach since the basic training being held. Most coaches have not had capable coaching skills. Most of them identify participants competence technically from problems they face and almost half of them identify the participants competence adaptively. It happens because they obtain less explanation and training on how to differ coaching from mentoring in the basic training of civil servant candidates.

Keywords: *coaching, mentoring, counselling, coach’s competencies and qualifications, coaching model and techniques*

Al Ahzar

The Effectiveness of the Teacher Competency Improvement Training in the Field of Marine, Fisheries, Information and Communication Technology in Indonesia

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Number 1 June 2021, Page 59-78

Teachers have to optimize their competence and performance in carrying out their duties as educators so that the learning process might run effectively and efficiently. Therefore, efforts are needed to improve teacher performance through education and training programs organized by government education and training institutions. This study aimed to identify the level of effectiveness in implementing teacher competency improvement in the fields of marine, fisheries, information technology and communication in Indonesia as a program of the Ministry of Education and Culture through LPPPTK KPTK as a technical implementation unit. The data used in this study were the targets and realization of teacher training participants in the marine, fisheries, information technology and communication field in 2015-2019. Methods of searching for data and other information by searching literature / literature and analyzing secondary data. The data analysis of this study was a qualitative descriptive analysis. The results showed that the improvement of teacher competency in the KPTK field which was carried out for five years (2015-2019) was effective. It was proven by the implementation of all education and training programs in accordance with the specified time schedule, the orderly implementation of all education and training activities, efficiency in the use of available facilities and infrastructure, and the achievement of the targets set for the education and training program out of a total target of 15,096 people, which was realized as many as 20,901 people (138.5%).

Keywords: *Effectiveness, Competency Improvement, Teachers*

Rudi Salam, Haedar Akib, Syakib Arsalam

The Function of Modern Office Administration to Enhance Public Organization Practice

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Number 1 June 2021, Page 79-94

This study aims to identify and analyze the functions of modern office administration in supporting the implementation of public organizations. This type of research is descriptive analysis (qualitative). The research location in Barombong District Office which the informants are service recipients, sub-district heads, sub-district secretaries, staff/employees and the community. The results of the study indicate that the implementation of public organizations is greatly helped by the existence of modern office administration. There are several organizational factors that assist the implementation of public organizations in the utilization of modern office administration functions such as: leadership, organizational culture, communication, and technology. For the four factors, only the technological aspect still needs to be improved because the use and supply of technology is still low. As a result, the implementation of the service is effective but has not been able to be categorized as an efficient service.

Keywords: *Organizational; Modern Office; Modern Administration*

Andi Ni'mah Sulfiani

Implementation of Good Governance Principles in BPJS Health Services in the City of Palopo

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Number 1 June 2021, Page 95-116

The implementation of good governance applied as part of the effort to implement the principles of democracy and democratization, which reflects the high regard for the fulfillment of people's rights by the authorities, upholding the values of justice and social solidarity, and the enforcement of human rights in various aspects of the life of the state. This study aims to find out and understand the problems regarding how to implement the principles of good governance in BPJS Health services in Palopo City. One of the problems that occur is the lack of openness to information related to fees and fines that must be paid by BPJS participants in Palopo City. This study seeks to uncover problems related to the principles of good governance by describing the facts that exist at the BPJS Kesehatan Branch Office in Palopo City and the reason the author chose this locus is because there are many public complaints regarding the services provided by the BPJS office employees. This research was conducted by conducting direct interviews and documentation of a number of informants with reference to the principles of good governance according to UNDP in answering the problem formulation consisting of accountability, transparency, openness and the rule of law. Data analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation, and conclusion drawing. This study shows that the implementation of the principles of good governance in BPJS Health services in Palopo City has not been fully fulfilled. This is proven by the fact that there are still complaints from BPJS Health participants regarding service fines and contributions for BPJS Health users/participants in Palopo City.

Keywords: *Implementation, Services, BPJS Health*

Milawaty

Portrait of Government Role on Children Protection: A Case Study of Sexual Violence at Natural Disaster Emergency Response in Indonesia

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Number 1 June 2021, Page 117-150

This study aims to capture children sexual violence at Natural Disaster Emergency Response in Indonesia, find out the factors causing the occurrence of children's sexual violence at Natural Disaster Emergency Response in Indonesia, and see the role of government and local governments in protecting children from sexual violence. The research was using a qualitative approach through literature study with an emphasis on children survivors of natural disasters. Incidence data is focused on disaster situation, especially in emergency response period in some refugee camps. This taken with the consideration that this was a vulnerable period as well as a period of many cases of children sexual violence. The results of the study found that: (1) The forms of sexual violence obtained include neglect, trafficking of children, rape and attempted rape, discrimination, harassment, early marriage and forced marriage, and surveillance during bathing in evacuation locations, (2) construction of buildings that are not in accordance with the gender of infrastructure, social norm factors, decreased parental protection, economic uncertainty, humanitarian assistance that is gender insensitive and child care, length of time for displacement, sexual violence that is not followed up to the police, weak security regulations and safety, the large role of the media, and families who are separated from their communities are factors causing the children sexual violence, (3) The role of the government and local governments is that the government formulates and implements policies of children protection and provides support for facilities, infrastructure and the availability of human resources in the implementation of children protection. Meanwhile local governments implement and support national policies in the implementation of children protection in the regions, as well as providing support for facilities, infrastructure, and availability of human resources in implementing children protection.

Keywords: *Sexual Violence, Child Disaster Survivors, Child Protection*

Avrina Dwijayanti

The Function of Bureaucracy as Policy Advisor: Phenomenological Studies in Local Government

Jurnal Administrasi Publik Volume XVII Number 1 June 2021, Page 151-174

Bureaucracy, apart from its function in administrative matter, need to examine as a policy advisor, especially in government where the political and administrative dichotomy is no longer seen in rigid boundaries also dynamic of the interaction between bureaucrats and politicians. This study aims to restate the position of the bureaucracy as carrying out its function as policy advisor for local governments. This study uses a phenomenological research design, with qualitative data analysis techniques. Data were collected through interviews, observations and document studies which relevant to the research topic, namely by accumulating data from several local governments to see trends in the implementation of this function. The results of the study showed that the support system for the implementation of the bureaucratic function as a policy advisor available through information channels. The dominant obstacle is the capacity of the bureaucrats' professional expertise and the emergence of competition between the bureaucracy and other actors in providing policy advice as a result of the electoral situation.

Keywords: *Function of Bureaucracy; Policy Advisor; Local Government.*